



Otoritarianisme Orde Baru dalam Karya Puisi Wiji Thukul

Rahma Suryani Ifra¹, Kurniawati², Abrar³, Etmi Hardi⁴

^{1,2,3}Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Negeri Padang, Indonesia

E-mail: rahmasuryaniifra30@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-12-15 Revised: 2025-01-22 Published: 2025-02-01 Keywords: <i>Poetry;</i> <i>Authoritarianism;</i> <i>New Order;</i> <i>Wiji Thukul.</i>	This article examines the depiction of the authoritarian government during the New Order era as reflected in Wiji Thukul's poetry collection, <i>Nyanyian Akar Rumput</i> . Thukul's works often criticize government policies, portray the social realities of his time, and represent the struggles of his social class. This study employs a library research method with a hermeneutic approach to analyze the meanings within his poems. The analysis of 18 poems reveals three key points. First, there is a strong connection between Wiji Thukul's social, cultural, and personal experiences and the themes in his poetry. Second, these poems reflect the repression, violence, terror, arrests, and abductions perpetrated by the New Order regime, serving as a voice of resistance for the marginalized. Third, economic authoritarianism is depicted through themes of poverty, social inequality, labor exploitation, and corrupt practices, as seen in poems like <i>Kepada Ibuku</i> , <i>Sajak Kepada Bung Dadi</i> , and <i>Nyanyian Akar Rumput</i> . In politics, poems such as <i>Merontokan Pidato</i> and <i>Mendongkel Orang-Orang Pintar</i> critique press suppression and violence against opposition. In education, depoliticization is highlighted in the poem <i>Aku Lebih Suka Dagelan</i> . Thukul's works collectively serve as a mirror of resistance against New Order oppression.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-12-15 Direvisi: 2025-01-22 Dipublikasi: 2025-02-01 Kata kunci: <i>Puisi;</i> <i>Otoritarianisme;</i> <i>Orde Baru;</i> <i>Wiji Thukul.</i>	Tulisan ini membahas potret pemerintahan otoriter era Orde Baru yang tercermin dalam kumpulan puisi <i>Nyanyian Akar Rumput</i> karya Wiji Thukul. Karya-karya Thukul banyak mengkritik kebijakan pemerintah, menggambarkan realitas sosial masanya, serta mewakili perjuangan kelas sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan hermeneutika untuk menganalisis makna dalam puisi-puisinya. Hasil kajian terhadap 18 puisi menunjukkan tiga poin utama. Pertama, terdapat keterkaitan erat antara latar belakang sosial, budaya, serta pengalaman hidup Wiji Thukul dengan tema-tema dalam puisinya. Kedua, puisi-puisi ini merefleksikan pembungkaman, kekerasan, teror, penangkapan, dan penculikan yang dilakukan rezim Orde Baru, menjadi suara perlawanan bagi rakyat kecil. Ketiga, otoritarianisme ekonomi tergambar melalui tema kemiskinan, kesenjangan sosial, eksploitasi buruh, dan praktik KKN, seperti dalam puisi <i>Kepada Ibuku</i> , <i>Sajak Kepada Bung Dadi</i> , dan <i>Nyanyian Akar Rumput</i> . Dalam politik, puisi-puisi seperti <i>Merontokan Pidato</i> dan <i>Mendongkel Orang-Orang Pintar</i> mengemukakan pembungkaman pers serta kekerasan terhadap oposisi. Pada bidang pendidikan, depolitisasi pendidikan diungkapkan dalam puisi <i>Aku Lebih Suka Dagelan</i> . Karya Thukul secara keseluruhan menjadi cermin perjuangan melawan represi Orde Baru.

I. PENDAHULUAN

Instabilitas pada akhir Orde lama menjadi Stabilitas politik sebagai agenda Orde Baru. Cara Orde Baru melakukan stabilitas ini diperlukan restrukturisasi politik yaitu dengan menerapkan sentralisme politik, sentralisme politik ini yang pada akhirnya menjadikan orde baru sebagai kekuasaan yang bercorak otoriterianisme dalam kurun waktu 32 tahun. Yusa Farchan (2022) memamparkan bahwa kekuasaan politik Orde Baru yang bercorak otoriter setidaknya berakar pada 5 sumber yaitu; respresi (Dibentuknya lembaga untuk melakukan kontrol terhadap

masyarakat seperti Badan Intelijen Strategis, Ditjensospol dan Kopkamtib), kekuasaan material yang terkonsentrasi, wacana politik partikularistik, subordinasi bisnis terhadap negara dan pengendalian birokrasi sipil dan militer. Artinya Dibalik kemajuan yang dialami Indonesia dalam segi pembangunan ternyata mempunyai sisi lemah seperti praktik ketimpangan sosial, diantaranya penindasan, kemunculan berbagai tindak kriminal dan peningkatan kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Kisah kepemimpinan Presiden Soeharto yang beraliran keras dianggap memberikan dampak kurang baik pada perpolitikan Indonesia sehingga memunculkan berbagai pertentangan dari banyak kalangan, baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Pada masa ini muncul tindakan perlawanan yang mengacu pada pemberontakan dan protes. Dalam majalah Saksi Edisi 2 Maret 2016 dinyatakan semua elemen rakyat yang mencoba mengkritik dituduh subversive, diculik, dipukul, ditahan hingga penghilangan nyawa seseorang. Banyak pelanggaran hak azasi manusia dilakukan oleh negara kala itu. Kritik terhadap penguasa Orde Baru dilakukan melalui apa saja karena pada dasarnya setiap aksi-aksi yang dilancarkan merupakan perjuangan ide atau gagasan rakyat melawan pemerintah.

Selanjutnya pada tahun 1976-1978 terjadi persoalan kemiskinan di Indonesia, yakni 40% penduduk berpenghasilan kurang dari 90 USD per tahun, pengangguran naik hingga dua juta jiwa setiap tahun. Tingkat konsumsi 40% penduduk miskin pedesaan turun hingga tiga persen per tahun. Hal ini disebabkan oleh pemerintah lebih mengutamakan pembangunan perkotaan dibanding pedesaan sehingga terjadi ketimpangan antara di kota dan di desa.

Pada zaman Orde Baru banyak anak yang putus sekolah dan kesempatan kerja terbatas, sulitnya mencari pekerjaan sehingga banyak yang bekerja menjadi kuli, pengamen, pengemis dan tukang parker. Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang dapat dimanfaatkan untuk dapat mensejahterakan penduduknya. Orde Baru tidak segan melakukan tindakan represif untuk menindas segala gerakan yang bersifat subversive dan berpotensi mengancam kekuasaannya. Salah satu nya dalam bidang pers, lembaga pers yang sebelumnya kritis berusaha dibungkam dan dijinakan melalui lembaga-lembaga perijinan. Pers yang tidak mau tunduk dan patuh akan dikenai hukuman dalam bentuk larangan cetak atau larangan terbit. Propaganda politik yang menyentuh segi politik dan pendidikan serta penguasaan perekonomian yang hanya dirasakan oleh kalangan atas menjadikan Orde Baru menganut sikap otoriter dalam sebuah tatanan negara yang dalam UUD 1945 Indonesia yang menerapkan sistem Demokrasi. Hal ini ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto sebagai presiden Indonesia. Hal-hal diatas tak luput diceritakan oleh Wiji Thukul melalui kumpulan puisi-puisinya.

Wiji Thukul lahir pada 26 Agustus 1963 di Solo, Jawa Tengah. Ia adalah anak dari tukang becak di Solo. Wiji Thukul Drop Out dari sekolah menengah Kerawitan Indonesia jurusan tari pada tahun 1982. Setelahnya Wiji bekerja disebuah Perusahaan mabel antik sebagai tukang pelitur, meski begitu Wiji Tetap aktif dalam dunia puisi dan teater. Wiji diketahui aktif dalam kelompok teater Jagalan Tengah (Jagat). Pada 1989 Wiji Thukul pernah di undang membaca puisi oleh Goete Institue di aula kedutaan besar Jerman di Jakarta dan tahun 1991 Wiji Thukul juga tampil membaca puisi di Pusat Kebudayaan Belanda, Jakarta yang diselenggarakan Erasmus Huis. Nama Wiji Thukul juga tercatat aktif dalam Gerakan kaum buruh ia ikut sebagai demonstran di Kedungombo, Sritex dan beberapa demonstrasi di Solo. Wiji thukul kemudian membentuk Sanggar Suka Banjir yang dikemudian hari dan ini menjadi alat perkumpulan untuk melawan ketidakadilan dan penindasan pemerintah. Pada 27 Juli 1996 ketika terjadi peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli Dimana PRD dibawah pimpinan Budiman Sudjamiko dituding sebagai dalang dibalik peristiwa tersebut dan Wiji Thukul diketahui juga bergabung dalam PRD. Para aktivis PRD diburu dan Wiji Thukul yang saat itu berada di Solo melukukan pelarian. Dalam pelariannya, ia tetap aktif menulis sajak.

Wiji Thukul juga aktivis pro-demokrasi bersama mahasiswa hingga akhirnya ia hilang pada tahun 1998. Sastra puisi adalah caranya mengungkapkan kejanggalan dalam kekuasaan Soeharto (Orde Baru). Puisinya tidak terlalu mementingkan kaidah sastra, sederhana dan frontal. Kajian penelitian ini penting untuk menjelaskan kehidupan masyarakat pada pemerintahan otoriter orde baru terkhusus kalangan bawah dimana kebebasan dikekang oleh pemerintahan.

Karya sastra adalah representasi dari berbagai fenomena kehidupan manusia yang dituangkan melalui Bahasa. Melalui proses kreatif karya sastra tidak hanya mencerminkan pengalaman pribadi penulis tapi juga menggambarkan berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, politik moral dan aspek-aspek kehidupan manusia secara lainnya. Dengan menggunakan Bahasa, karya sastra mampu menyampaikan emosi, konflik serta nilai-nilai budaya yang ada di Masyarakat. Oleh karena itu, sastra berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan ide, gagasan dan sebagai sarana untuk memahami lebih dalam tentang kompleksitas manusia dan realitas kehidupan mereka. Karya sastra kerap

dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk, mempengaruhi bahkan mengubah Masyarakat. Oleh karena itu tidak heran jika beberapa sastrawan menghadapi pencekalan atau ancaman dari pihak tertentu setelah menerbitkan karyanya.

Penjelasan problema tersebut tidak hanya menjelaskan secara fakta melalui buku-buku non fiksi, namun juga dijelaskan dalam bentuk naratif sastra puisi. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh pemahaman mengenai gambaran rezim orde baru dalam karya sastra puisi dan bisa menjadi salah satu alternative penggunaan media dalam proses pembelajaran sejarah. Selain itu hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Mempelajari Sejarah perjuangan yang bergerilia lewat tulisan, Wiji Thukul hadir dalam rangka pembebasan dalam belenggu sebuah Rezim. Penelitian tentang Orde Baru memang sudah banyak yang menulis akan tetapi angle sastra terkhusus puisi belum banyak yang menulis terutama dalam bentuk karya historiografi. Selain itu adanya dua oritentasi berbeda dalam karya-karya Wiji yaitu, menggambarkan keadaan manusia senyatanya pada masa Orde Baru dan mengkritisi pemerintahan Orde Baru

Penulisan terkait Wiji Thukul sudah diteliti oleh beberapa peneliti seperti Nahla Faizah; *Signifikansi Otoriterianisme dalam film adaptasi puisi Wiji Thukul Istirahatlah kata-kata* (Jurnal Nusa Vol.14 (4), 2021) tulisan ini mencoba menginterpretasikan keterpinggiran Wiji Thukul dalam film istirahatlah kata-kata, Wiji Thukul dari seorang yang revolusione menjadi seorang yang bungkam dan bisu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif subjek pembuat film dan konteks zaman ketika film tersebut di buat. Selanjutnya Skripsi Hantisa Oksinata *Kritik Sosial dalam kumpulan puisi aku ingin jadi peluru karya Wiji Thukul (Kajian resepsi Sastra)*. Universitas Sebelas Maret. 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif mengenai resepsi sastra kumpulan puisi Wiji Thukul yang berjudul aku ingin jadi peluru, pembaca dalam resepsi sastra ini di bagi menjadi tiga; pembaca ideal, pembaca biasa dan pembaca eksplisit. hasil penelitian ini adalah dari tiga kategori pembaca menyatakan penyair Wiji Thukul menulis puisi berdasar pada cerita kehidupan sehari-hari yang dialami sendiri, berasal dari kelas bawah, Wiji Thukul sosok penyair pemberani dan puisi ini menjadi ikon dalam aksi-aksi buruh dan demonstrasi mahasiswa.

Penelaahan Puisi-puisi Wiji Thukul ini dalam karya di atas ditulis menggunakan metode sastra, Kritik Wiji Thukul terhadap pemerintahan otoriter rezim orde baru belum mendapat tempat dalam historiografi Indonesia. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk otoriterianisme Orde baru dalam karya puisi Wiji Thukul menggunakan metode analisis isi dan pendekatan hermeutika serta memerlukan sumber primer maupun sekunder seperti; Kumpulan puisi Wiji Thukul, Surat Kabar, Majalah, Jurnal dan telaah referensi yang relevan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan hermeneutika untuk menggali makna mendalam dalam teks sastra serta menghubungkannya dengan konteks sejarah dan sosial-budaya yang melatarinya. Data primer yang digunakan adalah dua buku kumpulan puisi karya Wiji Thukul, yaitu *Nyanyian Akar Rumput* (2014) dan *Aku Ingin Jadi Peluru* (2000). Sementara itu, data sekunder yang mendukung penelitian meliputi buku biografi *Wiji Thukul: Teka-Teki Orang Hilang* karya tim redaksi Tempo (2013), serta berbagai buku, jurnal, majalah, dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa puisi-puisi Wiji Thukul menggambarkan realitas sosial, budaya, dan politik pada masa Orde Baru. Melalui pendekatan hermeneutika, ditemukan bahwa karya-karyanya mencerminkan perjuangan melawan otoritarianisme, menyoroti ketidakadilan sosial, kemiskinan, represi, serta ketimpangan kekuasaan yang terjadi saat itu. Dalam *Nyanyian Akar Rumput* dan *Aku Ingin Jadi Peluru*, Wiji Thukul menggunakan bahasa yang sederhana namun tegas untuk menyuarakan keresahan rakyat kecil, menjadikan puisi-puisinya sebagai medium perlawanan terhadap penindasan.

Penelitian ini juga mengungkap keterkaitan antara pengalaman pribadi Wiji Thukul sebagai bagian dari kelas pekerja dengan tema-tema dalam puisinya. Melalui analisis ini, karya sastra Wiji Thukul tidak hanya menjadi refleksi dari kondisi sosial-politik, tetapi juga menjadi alat kritik terhadap rezim Orde Baru, terutama dalam bidang sosial,

ekonomi, politik, dan budaya. Karya-karya ini berfungsi sebagai representasi perjuangan rakyat kecil dalam menghadapi represi pemerintahan yang otoriter.

B. Pembahasan

Dalam beberapa puisi Wiji Thukul, terdapat representasi kuat mengenai praktik otoritarianisme pada masa Orde Baru, khususnya terkait kebebasan berpendapat dan kontrol terhadap pers.

1. Pers dan Kebebasan Berpendapat

Kritik Wiji terhadap kebijakan Orde Baru tercermin dalam puisinya yang berjudul *Merontokan Pidato*. Puisi ini mengungkap pengamatannya terhadap retorika penguasa yang mengekang kebebasan dan memanipulasi makna kemerdekaan. Dalam bait:

kubaca Koran
kucari apa yang tidak tertulis
kutonton televisi
kulihat apa yang tidak diperlihatkan
kukibas-kibaskan pidatomu itu
dalam kepala hingga rontok
maka terang benderanglah ucapan
penguasa selalu dibenarkan

Wiji menggambarkan bagaimana propaganda pemerintah menutupi fakta yang sebenarnya. Puisi ini juga menyoroti penggunaan kekerasan untuk membungkam suara oposisi, seperti terlihat pada bait:

"laras senapan!
Tapi dengarlah
Aku tak akan minta ampun
Pada kemerdekaan ini
Berpendapat
Dan berserikat
Harus mencantumkan apa azasnya
Kalau nekat
Tembak ditempat

Pada empat larik pertama puisi tersebut, tergambar karakter Wiji Thukul yang tegas, tidak mau tunduk, dan berani menyuarakan pendapatnya meski berada di bawah tekanan rezim otoriter. Puisi ini ditulis pada tahun 1993, ketika politik Orde Baru mengalami perkembangan signifikan. Pada era 1990-an, Soeharto menerapkan strategi hegemoni politik dengan melibatkan sipil dan juga militer, sementara konsep "keterbukaan" dimanipulasi menjadi

kebijakan yang hanya terlihat positif secara permukaan.

Salah satu bukti nyata adalah pembredelan majalah *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* pada 21 Juni 1994 oleh Menteri Penerangan Harmoko melalui Surat Keputusan Nomor 123/KEP/MENPEN/1994. Penutupan ini dilakukan karena *Tempo* memberitakan pembelian kapal perang eks-Jerman Timur, terutama soal penyidikan sumber dana yang dianggap mengganggu stabilitas nasional dan melanggar persyaratan administratif SIUPP.

Penindasan terhadap kebebasan pers memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk tokoh prodemokrasi seperti Adnan Buyung Nasution, W.S. Rendra, dan Wiji Thukul sebagai perwakilan seniman. Kritik Wiji terhadap kebebasan berpendapat terlihat jelas dalam puisinya, yang kemungkinan besar ditujukan kepada pers atau organisasi massa yang berusaha menyampaikan aspirasi politik. Hal ini tercermin dalam penggalan bait dari puisi berjudul *Mendongkel Orang-Orang Pintar*.

Para pembicara dalam ruang seminar
Yang ucapannya dimuat
Di halaman surat-kabar
Mungkin pembaca terkagum-kagum
Tapi dunia tak bergerak
Setelah surat kabar itu dilipat

Bait puisi tersebut menggambarkan bagaimana surat kabar sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Kebebasan pers telah hilang di bawah rezim Orde Baru yang menciptakan mekanisme kontrol terhadap media massa. Penguasa menentukan isi media sesuai keinginan mereka, tanpa toleransi terhadap media yang kritis atau oposisi. Pers yang memberitakan kegagalan pemerintahan diancam pembredelan dengan alasan menjaga kesatuan negara. Akibatnya, masyarakat hanya menerima informasi dari satu sudut pandang yang sarat dengan propaganda politik Orde Baru. Hal ini tercermin dalam larik puisi Wiji Thukul, terutama pada larik kelima: "*Tapi dunia tak bergerak*".

Secara historis, kebijakan Orde Baru juga mendukung pembatasan kebebasan pers. Sebelum tahun 1993, banyak surat kabar harian yang dicabut Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Cetaknya (SIC). Contohnya,

Harian Nusantara diberedel, dan pada tahun 1978, tujuh surat kabar lainnya, termasuk *Kompas*, *Merdeka*, *Sinar Harapan*, dan *Pelita*, juga ditutup berdasarkan TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan UU No. 11/1966.

Kesesuaian antara puisi dan kenyataan menunjukkan bahwa Wiji Thukul berusaha memberikan kesaksian terhadap situasi pada masanya. Melalui puisinya, ia merefleksikan realitas politik yang terjadi, menjadi suara bagi mereka yang merasakan penindasan kala itu.

2. Intervensi Militer

Pendekatan Dwi Fungsi ABRI atau militer berkembang pesat pada masa Orde Baru, yang awalnya diterapkan karena dua alasan utama. Pertama, setelah peristiwa G30S, masih ada kebutuhan untuk memastikan keamanan di seluruh sektor dan wilayah Indonesia dari ancaman komunisme. Kedua, Orde Baru berkomitmen untuk melaksanakan program pembangunan yang memerlukan stabilitas keamanan. Dwi Fungsi ABRI tercantum dalam Pasal 6 UU No. 2 Tahun 1988, yang menyatakan bahwa:

“Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban Dwi-Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik.”

Praktek Dwi Fungsi ABRI ini mengarah pada militerisasi, di mana ABRI terlibat langsung dalam pemerintahan negara untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Prinsip militerisme ini mengharuskan anggota ABRI terlibat di berbagai sektor pembangunan, mengikuti perluasan kekuasaan negara.

Dalam puisi Wiji Thukul yang berjudul *Ceritakanlah Ini Kepada Siapa Pun Juga*, ia menyinggung tentang praktik militerisme yang terjadi dalam proyek pembangunan Waduk Kedungombo. Luas tanah yang digunakan mencapai 5.898 hektar dan melibatkan 30.000 orang dari 37 desa di Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan. Meskipun pembangunan ini diklaim untuk kepentingan rakyat, kenyataannya justru merugikan masyarakat setempat. Warga yang terkena dampak, terutama petani, merasa dirugikan karena selain kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian mereka

pun terganggu. Tidak semua warga menerima ganti rugi, dan ketidakpuasan ini tercermin dalam bait puisi Wiji Thukul.

Koran hari ini memberitakan
Kedungombo menyusut kekeringan
Korban pembangunan dam
Muncul kembali ke permukaan
(Agustus 1991)

Lebih lanjut, dalam kasus Waduk Kedungombo, militer digunakan untuk menekan petani yang menolak menyerahkan tanah mereka dengan menandai mereka sebagai PKI, salah satunya dengan memberi kode ET pada KTP mereka. Dalam pidatonya saat peresmian waduk di Desa Kedungombo pada 18 Mei 1991, Soeharto menyatakan bahwa mereka yang menolak pembangunan waduk adalah individu yang disusupi oleh komunis, dan Soeharto berpendapat bahwa proyek ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat. Namun, Wiji Thukul dengan keberaniannya menyuarakan pandangan berbeda dalam bait berikutnya dari puisinya *Ceritakanlah Ini Kepada Siapa Pun Juga*. Dalam puisi tersebut, Wiji seolah-olah menyampaikan pemikirannya sendiri mengenai pembangunan jangka panjang yang diklaim oleh Soeharto, serta menegaskan penolakannya untuk tunduk pada kekuasaan.

3. Depolitisasi Pendidikan

Dalam puisi berjudul *Aku Lebih Suka Dagelan* yang ditulis pada tahun 1987, Wiji Thukul menggambarkan berbagai kegagalan yang terjadi dalam proses pemilihan umum. Ia mencatat kesaksian dari orang-orang terdekatnya tentang adanya intimidasi, konflik antar tetangga, suap, dan perkelahian yang muncul akibat pelaksanaan pemilu yang tidak memenuhi prinsip Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) serta Jurdil (Jujur dan Adil).

Di radio aku mendengar berita
Katanya partisipasi politik rakyat kita
Sangat menggembirakan
Tapi kudengar dari mulut seorang kawanku
Dia diinterogasi dipanggil gurunya
Karena ikut kampanye PDI
Dan di kampungku ibu RT
Tak mau menegor sapa warganya
Hanya karena ia GOLKAR
(Solo, 1987)

Dalam puisinya tentang pemilu 1987, Wiji Thukul sudah menunjukkan perlawanan politik yang juga tercermin dalam puisi-puisinya yang ditulis menjelang dan setelah pemilu 1992. Sikap politik Wiji semakin jelas seiring dengan meluasnya pergaulannya di kalangan aktivis prodemokrasi, terutama mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun 1987, ketika pemilu kelima berlangsung pada 21 April, GOLKAR memenangkan 73,16 persen dari total suara. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa dominasi Golkar atas 50% kursi pemerintahan telah terwujud melalui tindakan preventif Soeharto terhadap oposisi, yang bertujuan untuk menghilangkan ancaman terhadap pemerintah. Pada tahun 1964, Sekber Golkar dibentuk oleh Angkatan Darat untuk mengkoordinasikan kelompok-kelompok komunis. Golkar, bersama Soeharto, mempropagandakan asas tunggal Pancasila dan memusatkan perhatian pada pembangunan. Dominasi Golkar begitu kuat, bahkan MPR tidak berfungsi sepenuhnya karena Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan anggota MPR dan DPR, yang melemahkan fungsi lembaga-lembaga tersebut.

Pada masa pemerintahan Soeharto, praktik intimidasi dan mobilisasi terjadi di kalangan murid dan guru, terutama di tingkat SLTA, untuk memilih GOLKAR. Ini merupakan contoh jelas otoritarianisme dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan dijadikan alat untuk kepentingan penguasa. Otoritarianisme ini harus dipahami dalam konteks ideologi yang membentuk rezim, di mana negara menggunakan pendidikan untuk memaksakan ideologinya, membentuk kesadaran, kepatuhan, dan karakter masyarakat sesuai dengan kepentingan penguasa. Sebagai bagian dari kontrol ini, partai-partai di Indonesia digabungkan menjadi tiga: Golkar, PPP, dan PDI. Golkar, sebagai representasi kekuasaan Orde Baru, menguasai birokrasi, termasuk birokrasi pendidikan. Caranya adalah dengan memasukkan korps guru ke dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (KOPRI), yang otomatis menjadikan mereka bagian dari Golkar. Ini menunjukkan bagaimana birokrasi pendidikan dijadikan alat untuk

mempertahankan kekuasaan negara. Propaganda Golkar sangat kuat di kalangan rakyat, dan Wiji sudah menyadari bagaimana hal ini tercermin dalam pemilu di sekitarnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Keberhasilan kebijakan pembangunan Orde Baru membuat Indonesia menarik perhatian dunia. Beberapa faktor kunci yang mendukung hal ini termasuk kekayaan sumber daya alam, seperti minyak, yang pada tahun 1987 turut meningkatkan perekonomian Indonesia yang sebelumnya terpuruk di masa Orde Lama. Itulah sebabnya Soeharto dijuluki sebagai Bapak Pembangunan. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat struktur perpolitikan dan sosial yang rapuh. Wiji Thukul, sebagai salah satu individu dari kalangan bawah, ikut terlibat dalam gerakan pro-demokrasi bersama para aktivis.

Perjuangan Wiji Thukul melalui puisinya bukan hanya dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pendidikan yang rendah, tetapi juga oleh proses belajarnya yang membantunya merekam berbagai realitas kehidupan masyarakat bawah. Melalui interaksi sosial yang dialaminya, Wiji mulai menyadari ketidakadilan dan penindasan yang ada. Pembungkaman, kekerasan, teror, penangkapan, dan penculikan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru mendorong Wiji untuk menciptakan puisi sebagai bentuk perlawanan yang mewakili suara rakyat kecil. Oleh karena itu, puisinya menggambarkan praktik otoritarianisme negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, pendidikan, serta gerakan pemuda, dan kritik terhadap kapitalisme negara yang busuk.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan teks tersebut adalah penting untuk terus mengkritisi dan mengevaluasi kebijakan pembangunan dari perspektif yang lebih holistik, dengan memperhatikan dampak sosial, politik, dan ekonomi yang mungkin timbul, terutama bagi kalangan bawah. Selain itu, perlu adanya ruang bagi suara-suara kritis dari masyarakat, seperti yang dilakukan Wiji Thukul melalui puisinya, untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi juga mencakup keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

DAFTAR RUJUKAN

Adhelano Tuakia. 2 Maret 2016. SAKSI. Rubrik Opini: 1-3

Afrizal Malna. *Wiji Thukul mata sejarah dalam budaya bisu*. Diakses pada 5 Agustus 2018 dari <https://indoprogress.com/2014/12/wiji-thukul-mata-sejarah-dalam-budaya-bisu/>.

Ainur Rofieq. *Civil Society Pasca Negara Birokratik Otoritarian Orde Baru*. Kybernan Vol. 3 (1). Diakses pada tanggal 19 September 2018

Alfan, Muhamad. (2015). *Dinamika Politik di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung: IKAPI

Baswir, Revisond dkk. (2003). *Terjajah di Negeri Sendiri: IMF dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: ELSAM

Djunaedi, dkk. (2013). *Wiji Tukul Teka-Teki Orang Hilang*. Jakarta: Gramedia

Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kusuma. 2012. *Propaganda Orde Baru 1966-1980*. Verlenden, Vol. 1 (1): Diakses pada 5 September 2018

Haritajaya, Olyvie Bintang, (2017). *Pembredelan Pers Di Masa Orde Baru (1996-1998)*. *Skripsi*, dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma

Hisyam, Muhamad. *Krisis Masa Kini dan Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Julie Southwood

Julie Southwood dan Patrick Flanagan. (2013). *Teror Orde Baru Penyelewengan Hukum dan Propaganda 1965-1981*. Terj. Tim Komunitas Bambu. Jakarta: Komunitas Bambu

Mahayana, Maman. S. 2005. *Sembilan Jawaban Sastra Indonesia*. Jakarta: Bening Publishing

M.C. Riklefs. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta

Mujiyanto, Yant. 2014. *Kitab Sejarah Sastra Indonesia: Prosa Dan Puisi*. Yogyakarta: Ombak

Pabottinggi, Mochtar. (1995). *Menelaah kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta:

Gramedia

Pamungkas, Sri Bintang. (2001). *Dari Orde Baru ke Indonesia Baru Lewat Reformasi Total*. Jakarta: Erlangga

R.E. Elson. (2010). *Soeharto Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Minda

Suryadinata, Leo. (1992). *Golkar dan Militer Studi Tentang Budaya politik*. Jakarta: LP3ES

Thukul, Wiji. (2004). *Aku Ingin Jadi Peluru*. Magelang: Indonesia Tera

Thukul, Wiji. (2014). *Nyanyian Akar Rumput*. Jakarta: Gramedia

Wardaya, Baskara T. (2007). *Menelusuri Akar Otoriterianisme di Indonesia*. Jakarta: ELSAM et al. (2008). *Menguak Misteri Kekuasaan Soeharto*. Yogyakarta: Galangpress

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Zed, Mestika. 1989. *Pengantar Historiografi Indonesia*. Padang: UNP Press

Makalah

Zed, Mestika. 1998. *Sastra dan Sejarah*. Dalam: Seminar Nasional "Sastra dan Sejarah" di IAIN Imam Bonjol Padang, 10 Oktober

Jurnal

Ainur Rofieq. *Civil Society Pasca Negara Birokratik Otoritarian Orde Baru*. Kybernan Vol. 3 (1). Diakses pada tanggal 19 September 2018

Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kusuma. 2012. *Propaganda Orde Baru 1966- 1980*. Verlenden, Vol. 1 (1): Diakses pada 5 September 2018

Yusa' Farchan. 2022. *Dinamika Sistem Politik Otoriterianisme Orde Baru*. Jurnal Adhikari, Vol. 1 (3); Diakses pada 10 Oktober 2024

Majalah

Adhelano Tuakia. 2 Maret 2016. SAKSI. Rubrik Opini: 1-3

Internet

Afrizal Malna. *Wiji Thukul mata sejarah dalam budaya bisu*. Diakses pada 5 Agustus

- 2018 dari
<https://indoprogess.com/2014/12/wiji-thukul-mata-sejarah-dalam-budaya-bisu/>.
- Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)". Diakses pada 9 Oktober 2018
https://www.researchgate.net/profile/Jumal-Ahmad/publication/325965331_Desain_Penelitian_Analisis_Isi_Content_Analysis/links/5b305090a6fdcc8506cb8b21/Desain_Penelitian-Analisis-Isi-Content-Analysis
- Linda Crishtanti. *Wiji Thukul dan Orang Hilang*. Diakses Pada 1 Desember 2018 dari
<http://www.lindachristanty.com/index.php/blog/post/wiji-thukul-dan-orang-hilang-oleh-linda-christanty>.
- Petrik Matanasi. <https://tirto.id/kejamnya-pengusuran-warga-kedung-ombo-dengan-dalih-pembangunan-cBfv> (Diakses pada 30 Novembbhyer 2018)
- Rudi Hermanto,
<http://sejarahunj.blogspot.com/2010/11/pembriedelan-pers-di-indonesia-1966.html>. Diakses pada 13 November 2010,
- Siti Nur Rahayu. *Narasi pelawanan terhadap Rezim Orde Baru dalam Novel Para Bajingan yang Menyenangkankarya Puthut EA: perspektif Moral Ekonomi James C.Scott*. Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Vol.1 (1): diakses pada 12 september 2018
- Sivfian Hendra Legowo, "Dinamika Politik Rezim Orde Baru Di Indonesia Studi Tentang Kegagalan Konsolidasi Politik Rezim Orde Baru Pada Tahun1990-1996". Diakses pada 19 November 2018
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/334>
- Wahyu Susilo
<https://entertainmen.kompas.com/read/2009/10/15/01321080/pemilu.dalam.puisi-puisi.wiji.thukul> Diakses pada 2 Desember 2018